

Kebijakan Migrasi Pemerintah Uni Emirat Arab Dalam Mengatasi Buruh Migran India Periode 2015 – 2019

Frانيا Maura Minzala Putri¹

Rizky Ihsan²

Bambang Pujiyono³

Abstract

This study provides a detailed about The United Arab Emirates Government's Migration Policy in Overcoming Indian Migrant Workers 2015 – 2019 Period. In analyzing the problem, this study uses the two theories, namely the theory of and public policy. The time period of this research between 2015 and 2019, which in the past 4 years cases of violations against Indian migrant workers that occurred in the United Arab Emirates continue to occur due to the kafala system. However, the violation cases are decreasing, but still high. The results show the kafala system causes many employers to commit violations. The kafala system results in a lack of free movement, confiscation of passports, unpaid wages, long working hours, underserved medical care, and violence against Indian migrant workers.

Keywords: *India, Kafala System, migrant workers, offenses, United Arab Emirates.*

Pendahuluan

Luas wilayah Uni Emirat Arab (UEA) yaitu 82,880km² (Protokol Dubai, 2021). Abu Dhabi merupakan ibukota UEA. Abu Dhabi menyumbang 87 persen dari total wilayah Uni Emirat Arab. Letaknya di tenggara Semenanjung Arab, Uni Emirat Arab bentuknya daratan segitiga dan terdapat garis pantai yang berhubungan dengan pantai Teluk Arab di bagian selatan dan tenggara, termasuk juga bagian dari pantai barat Teluk Oman (KEMLU RI, 2021). Uni Emirat Arab diumumkan sebagai negara bagian yang merdeka, berdaulat, dan federal. Uni Emirat Arab terdiri memiliki tujuh emirat, dimana terdapat Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ras Al Khaimah, Ajman Umm al Qaiwain dan Fujairah (Protokol Dubai, 2021). Otoritas federal UEA terdiri dari Dewan Tertinggi UEA, Presiden UEA, Wakil Presiden, Perdana Menteri, Dewan Federal Nasional, dan Kehakiman Federal. Bahasa yang digunakan yaitu Arab sebagai bahasa resmi dan Inggris yang banyak digunakan di perkotaan (Protokol Dubai, 2021). Mayoritas penduduk UEA menganut agama Islam. Di

¹ Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Budi Luhur. Email: franiaminzala@gmail.com.

² Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Budi Luhur.

³ Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Budi Luhur.

UEA etnisnya sebagian besar adalah etnis Emirati, dimana terdapat 11,6%. Terdapat pula etnis Asia Selatan, contohnya India, Pakistan serta Bangladesh. Jumlahnya mencapai sekitar 59,4% dari keseluruhan jumlah penduduk UEA (IPU, 2021).



Gambar 1. Peta Negara Uni Emirat Arab
Sumber: Departemen Protokol Uni Emirat Arab

UEA adalah salah satu Negara yang ekonominya termasuk terbesar di dunia (Keane, 2008: 82). Di Uni Emirat Arab terdapat tenaga kerja Asia Selatan cukup besar, dimana buruh migran berkontribusi besar untuk pertumbuhan ekonomi Uni Emirat Arab. Human rights watch mencatat terdapat 95 persen dari angkatan kerja Uni Emirat Arab merupakan migran dan jumlahnya mencapai 2,7 juta pekerja. Buruh migran tersebut terutama berasal dari India, Pakistan, Bangladesh, Nepal, dan Sri Lanka (Keane, 2008: 82). Akan tetapi, di Uni Emirat Arab kasus pelanggaran terhadap buruh migran tinggi. Terdapat pelanggaran berupa eksploitasi dengan penyitaan paspor, penolakan upah pada beberapa bulan pertama, hingga menahan membayar upah kepada mereka selama berbulan-bulan (Cooper, 2020: 67).

Salah satu masalah utama yang menjadikan banyaknya kasus pelanggaran yang terjadi kepada buruh migran di Uni Emirat Arab masalah hak asuh paspor (Prakash, 2014: 20). Dimana, banyak majikan atau agen penyalur tenaga kerja migran saat bekerja di Uni Emirat Arab menyita paspor. Lalu, paspor akan dikembalikan kepada pekerja saat sudah tidak bekerja. Dengan praktik ini, majikan memiliki kendali mutlak atas semua pergerakan buruh migran. Dari total pekerja, 73 persen paspor mereka disimpan oleh majikan. Hanya 21 persen dari mereka yang menyimpan paspor mereka sendiri. Hal tersebut menjadikan banyaknya kasus pelanggaran terhadap buruh migran, dimana terjadi banyak kasus majikan menolak untuk melepaskan paspor buruh migran (Prakash, 2014: 20). Migran dapat ditipu untuk mengeluarkan biaya untuk visa ilegal, hanya untuk memasuki negara itu dan menyadari bahwa tidak ada perusahaan atau tidak ada pekerjaan. Mereka kemudian mungkin dipaksa bekerja untuk majikan yang tidak bermoral, terdampar atau menghadapi hukuman (Migrant Rights, 2021).

Banyak migran hanya memiliki dua pilihan, yaitu bertahan dalam kondisi kerja yang tidak adil atau melarikan diri. Mereka yang melarikan diri dianggap ilegal. Mereka tidak berhak atas pembayaran kembali apa pun dan dapat didenda, ditahan dan

dideportasi tanpa batas waktu. Migran yang tidak mampu membayar tiket pulang mereka, serta migran yang ditinggalkan oleh majikan mereka, dapat terdampak selama bertahun-tahun. Pekerja migran sering tidak punya pilihan selain menanggung kondisi kerja yang buruk, termasuk upah yang kurang, tidak dibayar, jam kerja yang berlebihan, atau kondisi tidak aman (Migrant Rights, 2021).

Buruh migran yang terdampak paling besar dalam kasus pelanggaran buruh migran yaitu buruh migran India. Dimana pada tahun 2015 buruh migran India menempati posisi paling banyak buruh migran yang bekerja di Uni Emirat Arab. Terdapat 25% ekspatriat India yang terdapat di Uni Emirat Arab (Gulf News, 2021). Pada 2015 pemerintah India mendatangi kamp kerja paksa di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Pemerintah India menanyakan tentang tempat dan kesejahteraan kepada buruh migran India itu sendiri. Akan tetapi, buruh migran India tidak ada yang berani untuk merespon. Pemerintah India menyampaikan bahwa kondisi keselamatan, keamanan, dan kesejahteraan pekerja India tidak boleh diabaikan. India tidak akan membiarkan eksploitasi merajalela terhadap para pekerjanya. India meluncurkan kampanye untuk upah yang lebih tinggi bagi para pekerjanya di negara-negara Teluk termasuk UEA. Pemerintah India menaikkan gaji minimum yang mereka rekomendasikan karena biaya hidup yang lebih tinggi (Reuters, 2021).

Rasio kesehatan dan disparitas tenaga kerja asing di Dubai menjadi perhatian dalam pelanggaran sistematis hak asasi pekerja migran (Sönmez, 2011). Migrasi tenaga kerja di negara-negara *The Gulf Cooperation Council* (GCC), Bahrain, Oman, Kuwait, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab berusaha menentukan bagaimana penaklukan buruh migran dimulai dan dilestarikan (Hamz, 2015). Dinamika Proses Ekspatriasi berfokus pada aktivitas peran yang dimainkan oleh konsultan perekrutan luar negeri (Banu dan Amit, 2013). Berdasarkan latar belakang yang sudah dijabarkan, tulisan ini membahas kebijakan migrasi Pemerintah Uni Emirat Arab dalam mengatasi buruh migran India periode 2015 – 2019

Tim penulis menggunakan teori marxisme dan konsep kebijakan publik. Teori marxisme untuk menganalisis dampak sistem kafala. Kemudian, konsep Kebijakan publik digunakan untuk menganalisis kebijakan migrasi pemerintah Uni Emirat Arab. Terdapat asumsi dasar dari marxisme, dimana terdapat (1) Human Being-materialism. Marxisme lebih fokus dalam bentuk materialis, materi merupakan segalanya; (2) Kapitalisme membagi masyarakat menjadi dua kelas. Kelas pertama yaitu kaum kapitalis dimana mempunyai perindustrian dan pabrik. Kedua kaum proletariat yang diberikan upah dari hasil kerja keras mereka; (3) Pergerakan yang bagus dalam sejarah adalah hasil dari perjuangan kelas ekonomi; (4) Penggerak sejarah berasal dari perkembangan kekuatan produktif sendiri (industri, ilmu pengetahuan, teknologi); (5) Negara dan koersif intitusi (polisi, pengadilan, dll) adalah agensi dari kapitalis yang berkuasa (Sewell dan Woods, 2020). Knoepfel mengatakan jika kebijakan publik merupakan rangkaian keputusan atau kegiatan yang sengaja dibuat bersangkutan yang diambil atau dilakukan oleh berbagai aktor publik maupun pribadi, sumber daya, tautan institusional, dan minatnya bermacam-macam, tujuannya yaitu menyelesaikan masalah yang ditargetkan secara politis diartikan kolektif pada alam (Knoepfel, 2007: 24).

Pembahasan

Kasus pelanggaran buruh migran India di Uni Emirat Arab merupakan kasus yang belum bisa diatasi penuh. Banyaknya pelanggaran yang terjadi kepada buruh migran India membuat banyak laporan yang diajukan buruh migran India terkait pelanggaran yang terjadi. Sistem yang digunakan pekerja migran yaitu sistem kafala. Dalam pembahasan ini,

terdapat analisis kebijakan migrasi pemerintah Uni Emirat Arab dalam mengatasi buruh migran India periode 2015-2019.

Pada tahun 2015 beberapa ratus pekerja migran Asia Selatan, dimana termasuk buruh India di dalamnya mengadakan protes Dubai dan memblokir lalu lintas. Para pekerja migran mengenakan pakaian konstruksi hijau dan topi keras secara bersamaan. Mereka menuntut upah yang lebih tinggi untuk pekerjaan mereka di pengembangan Fountain Views yang merupakan sebuah proyek oleh Emaar Properties yang berbasis di Dubai untuk membangun apartemen kelas atas. Protes tersebut memperlihatkan kesenjangan kekayaan yang terlihat jelas antara pengunjung dan penduduk di daerah tersebut dengan pekerja miskin yang membangun semuanya, dimana sebagian besar berasal dari Pakistan, Nepal, Bangladesh, dan India (Guardian, 2021).

Pada tahun 2016 pemerintah Uni Emirat Arab menanggapi kritik buruh migran dan bergerak untuk memperkenalkan reformasi perburuhan. Pada awal tahun 2016 dikeluarkan keputusan untuk melindungi pekerja migran dari menjadi pekerja paksa meskipun hal ini tidak berlaku untuk pekerja rumah tangga swasta. Pada bulan September 2017, Uni Emirat Arab menyetujui undang-undang pertamanya tentang pekerja rumah tangga, yang mencakup sejumlah hak seperti satu hari istirahat yang dibayar per minggu, kepemilikan dokumen identitas pribadi mereka, dan pembebasan dari semua biaya litigasi jika perselisihan dengan majikan pergi ke pengadilan (Future Learn, 2021). UEA telah mengevaluasi kembali setiap aspek pekerjaan di negara itu mulai dari perekrutan hingga perumahan, memastikan bahwa semua pekerja imigran diperlakukan dengan hormat dan dapat melaporkan kasus penganiayaan dengan mudah. Membebaskan biaya rekrutmen kepada calon karyawan adalah ilegal di Uni Emirat Arab. Penyitaan paspor pekerja dilarang, dan pekerja tidak memerlukan izin majikan mereka untuk meninggalkan negara tersebut (UAE, 2021).

Pada tahun 2017, terdapat 8 juta pekerja migran India di Uni Emirat Arab. Jumlah migran India turun karena krisis ekonomi dan meningkatnya penggunaan visa kunjungan. Banyak pekerja India di Uni Emirat Arab, dari pembersih hingga pembangun mengatakan mereka telah berbicara dengan pemerintah dan badan amal tentang pelanggaran dari pemotongan upah hingga penyiksaan. Konsul Jenderal India di Dubai mengatakan bahwa pekerja migran India yang menggunakan saluran resmi dilindungi karena rincian majikan dan agen perekrutan dicatat. Kedutaan Uni Emirat Arab di India mengatakan Uni Emirat Arab tidak memiliki catatan migran yang bekerja dengan sistem masuk yang menggunakan visa kunjungan (Reuters, 2021).

Terdapat buruh migran India yang mengajukan pengaduan terhadap agen pekerjaan yang mengatur pekerjaan di Dubai dengan visa kunjungan. Buruh migran India tersebut dia bekerja 16 jam sehari tanpa lembur dan \$218 per bulan, dan upah tersebut tidak sesuai yang dijanjikan (Reuters, 2021). Akan tetapi pengaduan tersebut akan jadi masalah baru karena buruh migran tersebut menggunakan visa kunjungan. Sedangkan Uni Emirat Arab sendiri tidak memiliki catatan migran yang bekerja dengan sistem masuk menggunakan visa kunjungan. Artinya, banyak buruh migran India yang terjebak dengan tawaran upah besar, dimana kenyataannya upah yang diberikan tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Dengan banyaknya pekerja migran yang menggunakan visa kunjungan menyulitkan mereka untuk membuat laporan jika terjadi pelanggaran kerja, dikarenakan menggunakan visa kunjungan sebagai sistem masuk buruh migran termasuk ilegal.

Pada tahun 2018 terdapat 270 pekerja migran dengan visa turis yang belum dibayar penuh. Paspor mereka diambil oleh agen di bandara itu sendiri, mereka tidak dibayar selama berbulan-bulan. Tetapi mereka terus bekerja tanpa gaji karena mereka takut mengeluh tentang bekerja secara ilegal (Scroll.in, 2021). Pada tahun 2018, 59 persen kematian orang India di Uni Emirat Arab disebabkan oleh serangan jantung.

Penelitian baru yang dilakukan secara beragam oleh ahli jantung, ahli iklim, jurnalis dan akademisi menunjukkan bahwa buruh migran sedang bekerja keras di bawah suhu panas di UEA. Tingkat paparan panas di UEA dan stress dalam tekanan pekerjaan buruh migran berbahaya dan menyebabkan serangan jantung dan kematian. Panas yang berlebihan memperkuat kondisi kesehatan yang sudah ada sebelumnya termasuk penyakit pernapasan, otak, dan kardiovaskular. Temperatur yang tinggi juga mempersulit orang untuk bekerja dengan kapasitas penuh atau bekerja sama sekali, sehingga mengganggu keamanan, kesehatan, dan kesejahteraan mereka (Caravan Magazine, 2021).

Pada 2019, 15.501 pengaduan terdaftar di kedutaan India. Pengaduan tersebut terkait dengan penyalahgunaan tenaga kerja. Dimana, pengaduan tersebut berkaitan dengan keterlambatan dan tidak dibayarnya upah, penolakan hak dan tunjangan tenaga kerja, tidak dikeluarkannya dan perpanjangan izin tinggal, penolakan tunjangan mingguan dan lembur, penolakan hari libur mingguan, hingga jam kerja paksa yang dipaksakan (Human Rights, 2021).

Dari data yang sudah penulis jabarkan, dapat dilihat bahwa pada 2015 saat buruh India mengadakan protes di Uni Emirat Arab, tepatnya di Dubai. Hal tersebut menarik perhatian pemerintah Uni Emirat Arab dan pada 2016 pemerintah Uni Emirat Arab menanggapi kritik buruh migran dan bergerak untuk memperkenalkan reformasi perburuhan. Dimana, reformasi tersebut berguna untuk melindungi pekerja migran dari pekerjaan paksa. Lalu, di 2017 terjadi penurunan jumlah migran India yang terjadi karena krisis ekonomi dan peningkatan penggunaan visa kunjungan. Selanjutnya, pada 2018 terdapat 270 pekerja migran dengan visa kunjungan yang belum dibayar penuh. Akan tetapi mereka terus bekerja tanpa gaji karena mereka takut mengeluh tentang bekerja secara ilegal. Terakhir, di 2019 terdapat 15.501 pengaduan terdaftar di kedutaan India. Pengaduan tersebut terkait dengan penyalahgunaan tenaga kerja.

Dalam kurun waktu 4 tahun, kasus pelanggaran terhadap buruh migran India yang terjadi di Uni Emirat Arab terus terjadi. Namun, di tahun 2017 kasus pelanggarannya menurun. Namun, di tahun 2019 dengan pengaduan penyalahgunaan tenaga kerja sebanyak 15.501 menunjukkan jika kasus pelanggaran terhadap buruh migran masih tinggi, tetapi terjadi penurunan. Berdasarkan data yang sudah penulis temukan, dari tahun ke tahun kasus pelanggaran yang terjadi pada buruh migran India akibat sistem kafala tersebut mengalami perbaikan. Hal tersebut berjalan dengan adanya perhatian dari pemerintah Uni Emirat Arab dalam menangani kasus pelanggaran buruh migran India di Uni Emirat Arab. Perhatian tersebut dikeluarkan berupa regulasi regulasi guna melindungi pekerja migran.

Regulasi - regulasi pemerintah Uni Emirat Arab memudahkan para pekerja migran untuk melaporkan jika terjadi pelanggaran terhadap buruh migran tersebut. Regulasi yang paling berpengaruh dalam berkurangnya pelanggaran – pelanggaran yang dialami oleh pekerja migran yaitu pada poin kebijakan, dimana pekerja tidak memerlukan izin majikan mereka untuk meninggalkan negara tersebut. Dimana pada aturan sebelumnya, buruh migran harus mendapatkan izin dari majikan atau agen penyalur tenaga kerja. Dikarenakan mereka yang bertanggung jawab penuh atas buruh migran, tetapi dengan revisi aturan tersebut berdampak positif dalam penurunan kasus terhadap pelanggaran buruh migran.

Selanjutnya, Uni Emirat Arab juga telah meratifikasi sembilan konvensi utama International Labour Organization (ILO) terkait dengan hak-hak pekerja dan telah mengadopsi banyak undang-undang untuk melindungi hak-hak pekerja, termasuk di bidang alam, gaji, perumahan, dan kesehatan. Uni Emirat Arab juga memiliki banyak Nota Kesepahaman dengan negara asal pekerja, yang dirancang untuk mempromosikan kerja sama dalam melindungi hak-hak pekerja di Uni Emirat Arab. Uni Emirat Arab terus bekerja untuk memperkuat perlindungan pekerja. Pada tahun 2017, Uni Emirat Arab menerapkan

langkah-langkah luas untuk mendukung pekerja rumah tangga di luar negeri (Undang-Undang Federal No. 10 tahun 2017), menjamin hak individu untuk menyimpan dokumen dan paspor pribadi, berganti majikan dengan lebih mudah, dan menerima cuti berbayar yang wajib, asuransi, dan akomodasi. Reformasi berfokus pada peningkatan transparansi persyaratan kerja dan kontrak kerja dan menjelaskan bagaimana kontrak dapat diakhiri (Movaic, 2021).

Kesimpulan

Sistem kafala, dimana memberikan tanggung jawab penuh majikan atas buruh migran menyebabkan banyaknya majikan yang melakukan pelanggaran. Sistem kafala berdampak pada kurangnya gerak bebas, penyitaan paspor, upah yang tidak dibayar, jam kerja yang panjang, perawatan medis yang tidak dilayani, dan kekerasan terhadap buruh migran India. Dalam kurun waktu 4 tahun, kasus pelanggaran terhadap buruh migran India yang terjadi di Uni Emirat Arab terus terjadi. Namun, di tahun 2017 buruh migran India menurun sehingga kasus pelanggarannya pun ikut menurun. Namun, di tahun 2019 dengan pengaduan penyalahgunaan tenaga kerja sebanyak 15.501 menunjukkan jika kasus pelanggaran terhadap buruh migran masih tinggi, tetapi terjadi penurunan. Hal tersebut berjalan dengan adanya perhatian dari pemerintah Uni Emirat Arab dalam menanggapi kasus pelanggaran buruh migran India di Uni Emirat Arab. Perhatian tersebut berupa dikeluarkan regulasi-regulasi guna melindungi pekerja migran.

Akan tetapi pada kasus pelanggaran yang terjadi kepada buruh migran India, dimana kasus pelanggaran tersebut berasal dari penipuan yang dilakukan oleh agen-agen penyalur tenaga ilegal sulit untuk ditindak lanjuti. Karena pemerintah Uni Emirat Arab hanya mempunyai catatan buruh migran yang resmi, begitu juga dengan pemerintah India yang hanya menjamin warganya yang bekerja di Uni Emirat Arab dengan jalur resmi. Jika terdapat pengaduan dari buruh migran India ilegal yang mendapat tindakan pelanggaran kerja pun, kemungkinan besar buruh tersebut justru akan menjadi bumerang bagi pekerja tersebut. Pasalnya pekerja ilegal tersebut menetap dengan visa kunjungan. Sedangkan pemerintah Uni Emirat Arab menggunakan sistem kafala dengan penggunaan visa tinggal dan melarang penggunaan visa kunjungan untuk menetap bekerja di Uni Emirat Arab.

Selanjutnya, kasus pelanggaran yang terjadi dalam kurun waktu 4 tahun pada buruh migran India di Uni Emirat Arab, memenuhi asumsi dasar marxisme. Dimana asumsi dasar yang terpenuhi yaitu terdapat *Human Being-materialism*, kapitalisme membagi masyarakat menjadi dua kelas, pergerakan yang bagus dalam sejarah adalah hasil dari perjuangan kelas ekonomi, serta terdapat akibat dari kapitalisme membagi masyarakat menjadi dua kelas.

Referensi

- Apa itu Marxisme? (Bagian Pertama: Materialisme Dialektis). <https://www.marxist.com/apa-itu-marxisme-bagian-pertama-materialismedialektis.htm>. (28 Maret 2020).
- Rusdiyanta&Bambang Pujiyono. (2020). Modul Kebijakan Publik. Jakarta: Universitas Budi Luhur, hal. 4 & 5.
- Prakash, B.A. 2014. INDIAN MIGRANT WORKERS IN UNITED ARAB EMIRATES. hal. 20.
- BBC. Sistem reformasi Arab Saudi kafala yang disebut 'kebijakan perbudakan', buruh migran 'bekerja 24 jam hingga merekomendasikan bunuh diri'. <https://www.bbc.com/indonesia/majalah-54916830>. (10 Mei 2021).
- Keane, David. 2008. Enforcing Migrant Workers' Rights in the United Arab Emirates. *International Journal on Minority and Group Rights*. hal. 82.

- Departemen Protokol Dubai. About the United Arab Emirates. <https://www.protocol.dubai.ae/UAE-Dubai/About-the-United-ArabEmirates>. (4 Juli 2021).
- Direktorat Kementerian Luar Negeri dan Kerjasama Internasional Uni Emirat Arab. Labor Rights. <https://www.mofaic.gov.ae/en/The-Ministry/The-ForeignPolicy/Laborand-work-rights>. (4 Juli 2021).
- Dubai: a city of temporary migrants. <https://www.futurelearn.com/info/courses/migrationtheories/0/steps/35094>. (2 Juli 2021).
- For Indian migrants, the quicker and cheaper route to UAE is also the more exploitative one. <https://scroll.in/article/950105/for-indian-migrants-thequicker-and-cheaper-route-to-uae-is-also-the-more-exploitative-one>. (16 Juni 2021).
- Gulf News. Indians, Pakistanis make up 37% of Dubai, Sharjah, Ajman population. <https://gulfnews.com/going-out/society/indians-pakistanis-make-up-37-ofdubai-sharjah-ajman-population-1.1562336>. (4 Juli 2021).
- India: 34,000 migrant workers have died in the Gulf since 2014; activists criticize lack of protections. <https://www.business-humanrights.org/en/latestnews/india-34000-migrant-workers-have-died-in-the-gulf-since-2014-activists-criticise-lack-of-protections/>. (3 Juli 2021).
- International Labour Organization (ILO). EMPLOYER-MIGRANT WORKER RELATIONSHIPS IN THE MIDDLE EAST: Exploring for internal labour market mobility and fair migration. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---arabstates/---robeirut/documents/publication/wcms_552697.pdf. (13 Juni 2021).
- Kedutaan Indonesia di Uni Emirat Arab. Persatuan Emirat Arab. <https://kemlu.go.id/abudhabi/id/read/persatuan-emirat-arab/2307/etcmenu>. (16 April 2021).
- Banu, Mahjabin dan Mini Amit. 2013. Dynamics of Expatriation Process – A Case of Indian Expatriation to UAE. *Global Journal of Management and Business Studies*. Vol 3.
- Valenta, Marko dkk. 2019. Temporary Labor–Migration System and Long–term Residence Strategies in the United Arab Emirates. *International Migration*. Hal. 6-7.
- Migrant Rights. Reformasi Sistem Kafala. <https://www.migrantrights.org/campaign/end-the-kafala-system/>. (29 Juni 2021).
- Cooper, Nicholas. 2020. City of Gold, City of Slaves: Slavery and Indentured Servitude in Dubai. *Strategic Security*. Vol. 6, No. 3, hal. 67.
- PM Modi visits UAE labor camp, underscores concern over worker welfare. <https://www.reuters.com/article/abudhabi-india-modiidINKCNOQL0N820150817>. (13 Juni 2021).
- Portal Resmi Pemerintah Uni Emirat Arab. Workers' rights. <https://u.ae/en/aboutthe-uae/human-rights-in-the-uae/workers-rights>. (28 Juni 2021).
- Profil Negara Uni Emirat Arab (United Arab Emirates). [https://ilmupengetahuanumum.com/profil-negara-uni-emirat-arab-unitedarabemirates/#:~:text=Uni%20Emirat%20Arab%20memiliki%20luas,beragam%20Islam%20\(sekitar%2076%25\)](https://ilmupengetahuanumum.com/profil-negara-uni-emirat-arab-unitedarabemirates/#:~:text=Uni%20Emirat%20Arab%20memiliki%20luas,beragam%20Islam%20(sekitar%2076%25)). (16 April 2021).
- Sönmez, Sevil dkk. 2011. Human rights and health disparities for migrant workers in the UAE. *Health and Human Rights Journal*.
- The Caravan. Deathly SubsistenceThe invisible migrant workers dying of “natural causes” in the Arab Gulf. <https://caravanmagazine.in/labour/migrantworkers-indian-gulf-deaths-natural-causes>. (16 Juni 2021).
- The Guardian. Foreign construction workers stage rare protest in Dubai over pay. <https://www.theguardian.com/world/2015/mar/10/foreign-workers-indubai-pay-protest>. (2 Juli 2021).